

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat melayani masyarakat secara optimal. Dalam pelayanannya terhadap masyarakat, aset tetap merupakan komponen penting untuk menunjang kegiatan operasionalnya. Aset tetap dapat berupa tanah, bangunan, peralatan, mesin dan lain sebagainya. Salah satu informasi yang harus disediakan oleh pemerintah adalah informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Terbitnya peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual, menyatakan setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi dan evaluasi kinerja dalam suatu Laporan Keuangan

Pemerintah. Dengan adanya pedoman tersebut, maka akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus mendukung adanya *good governance*.

Salah satu elemen statemen laporan keuangan adalah aset. Dinas Peternakan Provinsi NTT sebagai SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) ikut serta dalam menyusun laporan keuangan yang berstruktur untuk menyajikan informasi mengenai entitas pelaporan dan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Aset yang dimiliki oleh Dinas Peternakan Provinsi NTT terdiri dari Aset lancar dan Aset Tetap. Keberadaan Aset tetap di suatu instansi pemerintah seharusnya benar-benar milik instansi dan bukan pinjaman. Penggolongan aset tetap perusahaan yang tidak dapat disusutkan seperti tanah. Dan yang dapat disusutkan seperti bangunan, gedung, peralatan, perabotan kantor, kendaraan serta aset tetap lainnya.

Aset tetap yang digunakan oleh suatu instansi pemerintahan perlu adanya perlakuan akuntansi aset tetap. Dalam hal ini pengakuan, penilaian, pengukuran, dan pengungkapan pada masing-masing aset tetap kendaraan bermotor sangat perlu diperhatikan karena hal tersebut dapat menunjukkan kewajaran instansi dalam pencatatan akuntansi. Agar sejalan dengan prinsip akuntansi yang lazim, maka harus sesuai dengan PSAP No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Dinas peternakan Provinsi NTT dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya selalu memerlukan berbagai peralatan, perlengkapan dan sarana-sarana lainnya. Untuk menunjang kegiatan usaha tersebut dalam istilah Akuntansi di sebut dengan Aset Tetap. Komponen operasional yang

sangat penting dalam mendukung kelangsungan operasi perusahaan. Salah satunya aset berwujud seperti tanah, bangunan, mesin dan kendaraan sehingga memerlukan perlakuan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

Menurut Suharli (2006:259) menyatakan aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun bernilai material, dan digunakan untuk kegiatan operasional normal perusahaan dan merupakan pengeluaran yang nilainya besar atau material aset tetap berwujud pada dasarnya bisa memberikan gambaran kapitalisasi yang wajar, oleh karena itu dibutuhkan adanya perlakuan akuntansi yang memadai mulai dari saat perolehan sampai dengan saat pengalokasian biaya selama umur aset tetap berwujud tersebut. Perlakuan akuntansi aset tetap kendaraan bermotor ini bertujuan untuk memberikan kelayakan penyajian aset tetap berwujud sebagai salah satu bagian harta kekayaan secara keseluruhan.

Dengan adanya otonomi daerah diharapkan pemerintah daerah lebih melayani kebutuhan masyarakat sehingga tercapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Demi tercapainya harapan tersebut, maka pemerintah harus mampu menggali semua potensi yang ada di daerah yang merupakan aset atau kekayaan daerah. Dalam pelayanannya terhadap masyarakat aset tetap merupakan komponen penting untuk menunjang kegiatan operasionalnya.

Berdasarkan dari segi fungsinya aset tetap memiliki fungsi yang berbeda pada setiap jenisnya. Kendaraan bermotor juga sangat dibutuhkan untuk

mobilisasi pegawai dalam rangka peninjauan lapangan atas aktivitas pemerintahan lainnya. Masa pemanfaatan aset tetap kendaraan bermotor roda empat dan roda dua ini yang lebih dari satu tahun diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam jangka waktu yang relatif panjang. Manfaat yang diberikan aset tetap tersebut semakin lama semakin menurun secara terus-menerus, dan menyebabkan terjadinya penyusutan kecuali tanah. Selain penyusutan yang terjadi sepanjang pemanfaatannya aset tetap kendaraan bermotor juga rawan akan kehilangan, kerusakan, pemindahtanganan, pemusnahan, keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan hal-hal lain yang dapat memicu suatu aset tetap harus dihapuskan.

Kerusakan kendaraan ini disebabkan oleh kurang adanya perawatan /pemeliharaan dari pengguna kendaraan, sehingga ada beberapa kendaraan operasional dinas(roda empat dan roda dua)mengalami kerusakan. Pemerintah telah mengupayakan perbaikan bagi kendaraan-kendaraan yang rusak, namun kendaraan itu selalu mengalami kemacetan.Kondisi seperti ini sangat mengganggu kelancaraan aktivitas pemerintah terutama aktivitas perkantoran dan pelayanan terhadap masyarakat terhambat.Maka perlu adanya penghapusan kendaraan operasional tersebut.

Untuk mengatasi hal ini pemerintah telah membentuk sebuah panitia yang terdiri dari beberapa SKPD terkait. Panitia ini diberi nama panitia penghapusan aset daerah, yang mana dikoordinator oleh Bagian Umum Dinas Peternakan pada Sub Perlengkapan.

Dalam melakukan penghapusan aktiva daerah khususnya kendaraan roda dua dan roda empat diperlukan suatu metode. Metode ini adalah metode akuntansi. Metode ini di ambil untuk menerbitkan serta mengamankan barang daerah agar tidak terjadi penipuan dan kesalahan dalam proses penghapusannya, terutama untuk mengetahui sejauh mana nilai kendaraan tersebut apabila kendaraan tersebut dijual atau dilelang kepada pihak lain.

Tetapi dalam proses penghapusannya seringkali terjadi penguluran waktu karena membutuhkan suatu proses dan pada akhirnya menunggu surat keputusan kepala daerah mengenai penghapusan barang milik daerah tersebut diterbitkan. Sehingga proses penghapusan aset tetap yang dimaksud bergeser dari target waktu yang diharapkan sehingga aset tetap yang akan dihapuskan tersebut tidak serta merta dalam waktu yang cepat bisa dihapuskan.

Kendaraan bermotor roda empat maupun kendaraan roda dua yang ada pada Dinas Peternakan yang sudah melampaui umur ekonomis kendaraan dan mengalami kerusakan serta parkir begitu saja tidak memberikan manfaat bagi operasional dinas. Biaya pemeliharaan/perbaikan kendaraan ini sangat tinggi, oleh karena itu kendaraan yang rusak sebaiknya dihapus dari inventaris aset daerah, sehingga daerah tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk pemeliharaan kendaraan tersebut. Data kendaraan dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

**Tabel 1.1**  
**Data Inventaris Kendaraan Bermotor pada**  
**Dinas Peternakan Provinsi NTT**

No	Jenis barang	Merk/tipe	Tahun perolehan	UE	Harga Perolehan (Rp)	Nilai Buku (Rp)	Ket
1.	Sepeda motor	Honda	2002	16	13.700.000	0	RB
2.	Sepeda motor	Honda	2002	16	4.550.000	0	RB
3.	Mobil	Jeep	2003	15	61.700.000	0	RB
4.	Sepeda motor	Honda	2003	15	11.230.000	0	RB
5.	Sepeda motor	Yamaha	2003	15	11.225.000	0	RB
6.	Inova	Inova	2006	12	150.300.000	-	B
7.	Sepeda motor	Honda GL max	2006	12	8.580.000	-	B
8.	Sepeda motor	Honda win 110	2006	12	7.425.000	-	B
9.	Bus	Mercedes	2007	11	120.000.000	-	B
10.	Jeep	Toyota Rush SG	2010	8	193.400.000	27.628.571	B

*Sumber: Dinas Peternakan Provinsi NTT (2018)*

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa Mobil Jeep yang dibeli pada tahun 2003 dengan harga perolehan sebesar Rp 61.700.000 dan berumur ekonomis 16 tahun mengalami kerusakan. Tiga unit sepeda motor merk Honda masing-masing dibeli pada tahun 2002 dan 2003, berumur ekonomis 15 dan 16, dengan harga perolehan masing-masing sebesar Rp 4.550.000, Rp 13.700.000, dan Rp 11.230.000 dan 1 unit sepeda motor merk Yamaha dibeli pada tahun 2003, berumur ekonomis 15 tahun dengan harga perolehan Rp 11.225.000 juga mengalami kerusakan. Namun, dalam data diatas ada beberapa jenis kendaraan bermotor yang masih bisa digunakan karena kendaraan tersebut tidak mengalami kerusakan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut apakah Dinas Peternakan Provinsi NTT telah melakukan

perhitungan terhadap aset daerah yang mengalami penurunan masa manfaat atau belum.

Mengacu pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelitian dengan judul: **“Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Kendaraan Bermotor pada Dinas Peternakan Provinsi NTT”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah adalah Apakah Perlakuan Akuntansi Aktiva Tetap Kendaraan Bermotor pada Dinas Peternakan Provinsi NTT sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui perlakuan akuntansi terhadap aktiva tetap kendaraan bermotor pada Dinas Peternakan Provinsi NTT.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah khususnya Provinsi NTT dengan Perlakuan Akuntansi Kendaraan bermotor.
2. Untuk menambah wawasan penulis agar lebih mengetahui prosedur-prosedur terkait dengan perlakuan akuntansi